

**ANTECEDEN TERHADAP PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA**
(Studi pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)

Ida Ayu Made Rai Astuti¹, Dadang Sadeli², Nur Hidayat³

¹²³ Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pancasila
idaayu.astuti@yahoo.co.id

ABSTRACT

The study aims to find out impacts of budget plan, budget implementation and internal control to budget absorption in Badan Litbangkes. The samples for this study are 112 informants from 16 working units. Data analysis was done using quantitative method with survey approach. The conclusion from partially tested variable is that budget plan and internal control variables are significantly influent to budget absorption. On the other hand, budget implementation does not significantly influent to budget absorption. Based on simultaneous test, all independent variables, significantly influent to budget absorption. This research is expected to provide solutions for better preparation of planning and managing finance.

Keywords: Budget plan, budget implementation, Internal control and budget absorption

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Intern terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Badan Litbangkes. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 orang dari 16 Satuan Kerja. Analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Hasil pengujian variabel secara parsial yaitu Perencanaan Anggaran dan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap variabel Penyerapan Anggaran. sedangkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uji simultan baik Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan Intern secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengawasan Intern dan Penyerapan Anggaran

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya sebagai instrumen dalam pengambilan kebijakan pemerintah tetapi juga alat untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, ketiga paket Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Susanto, 2006). Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang mengeluarkan kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan belanja Kementerian/Lembaga, telah berupaya untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja dari sisi pendapatan maupun kinerja dari sisi belanja. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyerapan belanja K/L, diperlukan proses penyerapan belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi (Carsidiawan, 2008)

Mardiasmo (2009), mengemukakan paling tidak terdapat tiga aspek utama yang dapat mendukung keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam anggaran yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Meningkatnya porsi belanja pemerintah dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan penyerapan anggaran yang maksimal, hal ini terlihat pada pola penyerapan anggaran belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) dari tahun 2011-2014 rendah di triwulan I dan meningkat di triwulan IV. Rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan IV dari tahun 2011 – 2014 berkisar 32,07% - 58,39%, seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Realisasi Per Triwulan Tahun 2011 – 2014

BULAN	2011		2012		2013		2014	
	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%
Triwulan I	17.873	3,99	20.914	5,72	30.656	5,76	24.655	5,90
Triwulan II	48.676	10,88	60.617	16,59	196.545	36,91	104.453	24,98
Triwulan III	129.379	28,91	70.529	19,30	134.531	25,26	108.553	25,96
Triwulan IV	251.600	56,22	213.373	58,39	170.786	32,07	180.414	43,15
TOTAL	447.528	100	365.433	100	532.518	100	418.075	100

Sumber : Data diolah dari E-Monev DJA & Laporan Keuangan Badan Litbangkes

Menurut Siswanto dkk (2010), penyebab rendahnya penyerapan belanja terkait dengan persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen

pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi dan persoalan lain-lain. Penelitian yang dilakukan (Kuswoyo, 2011) mengungkapkan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya anggaran belanja di akhir tahun anggaran yaitu; faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang/jasa, dan faktor internal satuan kerja. Hasil penelitian (Sulaeman,2010) juga menunjukkan penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal, prosedur pelaksanaan yang menghambat dan kurangnya koordinasi atas instansi terkait. Demikian juga hasil penelitian (Fuadi, 2013) ditemukan bahwa pengawasan baik preventif dan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD.

Untuk lebih mengoptimalkan perencanaan penarikan/penyerapan dana oleh Satuan Kerja (satker)/ PA, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. PMK tersebut memberikan pedoman kepada PA dalam melakukan perencanaan penarikan dana. Dalam mempercepat proses pengadaan barang/jasa, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) No. 72 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pepres tersebut memberikan mandat pengadaan barang/jasa menggunakan *E-Procurement (E-Proc)* dimana proses pengadaan barang/jasa menggunakan sistem *online*. Dengan diterapkannya pengadaan secara elektronik, terjadi efisiensi waktu dan biaya.

Komitmen yang besar dari pemerintah terkait dengan optimalisasi penggunaan dana dengan berbagai permasalahannya tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. Selain alasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini karena penelitian terkait dengan penumpukan penyerapan anggaran belanja di Kementerian Kesehatan masih jarang dilakukan.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stiglitz (1999) menyatakan masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik publik maupun privat. Gilardi (2001), melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Nuning (2013), menyatakan hubungan keagenan dilingkungan pemerintah daerah memiliki *dual accountability*, yaitu hubungan keagenan antara legislatif (*principal*) dan eksekutif (agen), dan hubungan keagenan antara legislatif (*agent*) dan publik (*principal*). Terkait dengan anggaran, teori agensi dapat dilihat pada

hubungan eksekutif dan legislatif. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2013, anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh DPR/DPRD. Anggaran (*budget*) memainkan peran yang cukup penting dalam aktifitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Anggaran yang disusun dengan baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh organisasi pada periode tertentu.

Perencanaan (*Planning*) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Robins dan Coulter, 2002) dalam (Bastian, 2010). Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Menurut (Ernie dan Kurniawan, 2005) Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu:

1. Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai
2. Dari sisi manajemen, perencanaan adalah fungsi dimana pimpinan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi
3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, kapan dan siapa yang akan melakukannya.

Dalam mencapai perencanaan yang efektif, (Bastian, 2010) ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan yaitu:

1. Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang ditetapkan di sekitar area organisasi
2. Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan
3. Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014, tahun anggaran pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah adalah tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. PA/KPA melaksanakan kegiatan

sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, pemerintah juga melakukan perubahan peraturan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas untuk memberikan pedoman kepada PA dalam melakukan perencanaan penarikan dana

Menurut (zulkifli, 2003) pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terealisasi. Pengawasam tidak saja diperlukan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2009).

Alamsyah (1997), menyatakan tujuan pengawasan anggaran adalah untuk:

1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan
2. Menjaga agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan,
3. Menjaga agar hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

Hipotesis penelitian dirumuskan:

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Penyusunan rencana anggaran meliputi estimasi pendapatan dan belanja dengan mempertimbangkan realisasi periode sebelumnya, kecenderungan yang terjadi dan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada periode berikutnya. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran (Mardiasmo, 2009). Nugroho (2013) penyerapan anggaran dikatakan baik, apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2. Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomis terhadap keuangan negara dan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan RPD akan menyebabkan *iddle cash*. Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Lusiana 1997)

H2 : Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

3. Pengaruh pengawasan intern dengan penyerapan anggaran

Pengawasan diartikan sebagai suatu proses pengamatan dan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian Sondang, 1998). Menurut Alasmsyah (1997) tujuan pengawasan adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan, dan hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerja agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

H3 : Pengawasan intern berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

4. Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran

Penelitian Sukadi (2012), menyatakan penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran sebagai variable dependen secara serempak dipengaruhi oleh variabel independen antara lain faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang/jasa serta faktor internal satuan kerja. Zulkifli (2013) mengatakan pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terealisasi

H4 : Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada bulan Juni 2015 yang meliputi wilayah: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Aceh dan NTT. Populasi dalam penelitian ini adalah: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Perencanaan dan Anggaran, Staf Pengelola Perencanaan dan Anggaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), ULP/Pejabat Pengadaan Barang & Jasa (PPBJ), serta staf Pengelola Keuangan/verifikator yang bertugas di 16 Satker Badan Litbang Kesehatan.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan mengacu pendapat (Suharsimi Arikunto, 2010) dimana jika peneliti mempunyai beberapa ratus subyek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25 – 30 % dari jumlah subyek tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang, dan penelitian menggunakan angket sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya. Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 135, maka Sampel penelitian ini adalah semua populasi yang diterima setelah dilakukan verifikasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan mengajukan daftar pernyataan tertulis secara lengkap tentang masalah yang akan dibahas kepada para Responden, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti pada satuan kerja Badan Litbang Kesehatan berupa laporan Realisasi Anggaran dan DIPA.

Pengukuran kuesioner dengan skala ordinal atau sering disebut skala *Likert* (Ghozali, 2011) yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: Skala 5 (lima): Selalu (SL), skala 4 (empat): Sering (SR), skala 3 (tiga): Kadang-kadang (KK), skala 2 (dua): Hampir Tidak Pernah (HTP) dan skala 1(satu): Tidak Pernah (TP). Data yang diperoleh diolah dalam bentuk tabulasi dengan memberikan bobot jawaban pada masing-masing pernyataan. Model analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$. Jika nilai r hitung $>$ r table, maka dikatakan valid dan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau stabil jawaban seseorang terhadap pernyataan dari waktu ke waktu. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.70 (Ghozali 2011).

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ghozali (2011), Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Multikolonieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan model empiris yang digunakan untuk meneliti pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Persamaan regresi berganda dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Penyerapan Anggaran
X_1, X_2 dan X_3	=	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengawasan Internal Terhadap Penyerapan Anggaran
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
α	=	Konstanta
e	=	Error

Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai statistik $t_{hitung} > t_{tabel}$ menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent/terikat (Ghozali, 2011). Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ menyatakan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh satker di lingkungan Badan Litbangkes. Dari 135 kuesioner yang disebarkan sebanyak 112 (82.96%) kuesioner yang diterima kembali.

Tabel 2
Distribusi Kuesioner

Jabatan	Tersebar	Diterima	Persentase
KPA	16	13	81,25
PPSPM	16	16	100,00
BP	16	13	81,25
PPK	16	13	81,25
Pejabat PA	16	10	62,50
Staf PA	16	14	87,50
Verifikator	16	16	100,00
BPP	7	3	42,86
PPBJ	16	14	87,50
Total	135	112	82,96

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
D3	9	8,03
S1	58	51,79
S2	37	33,04
S3	2	1,78
Lainnya	6	5,36
Jumlah	112	100

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari Tabel 3, menunjukkan responden dengan pendidikan S1 paling banyak yaitu 58 orang (51,79%) selanjutnya pendidikan S2 sebanyak 37 orang (33,04%), D3 sebanyak 9 orang (8,03%), lainnya sebanyak 6 orang (5,36%) dan S3 sebanyak 2 orang (1,78%)

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Perencanaan Anggaran	1	0,520	0,186	Valid
	2	0,702	0,186	Valid
	3	0,481	0,186	Valid
	4	0,258	0,186	Valid
	5	0,559	0,186	Valid
	6	0,610	0,186	Valid
Pelaksanaan Anggaran	7	0,366	0,186	Valid
	8	0,371	0,186	Valid
	9	0,378	0,186	Valid
	10	0,203	0,186	Valid
	11	0,401	0,186	Valid
	12	0,403	0,186	Valid
	13	0,506	0,186	Valid
Pengawasan Intern	14	0,541	0,186	Valid
	15	0,627	0,186	Valid
	16	0,693	0,186	Valid
	17	0,727	0,186	Valid
	18	0,570	0,186	Valid
	19	0,597	0,186	Valid
Penyerapan Anggaran	20	0,404	0,186	Valid
	21	0,528	0,186	Valid
	22	0,458	0,186	Valid
	23	0,416	0,186	Valid
	24	0,448	0,186	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari Tabel 4, menunjukkan semua butir atau pertanyaan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	76,2679	177,693	0,52	0,521	0,89
Item_2	77,1696	167,475	0,702	0,638	0,885
Item_3	76,7143	174,548	0,481	0,433	0,89
Item_4	78,0179	180,45	0,258	0,376	0,895
Item_5	76,9375	171,05	0,559	0,46	0,888
Item_6	76,9196	169,966	0,61	0,519	0,887
Item_7	78,3929	180,817	0,366	0,32	0,893
Item_8	78,4196	173,129	0,371	0,308	0,894
Item_9	78,3393	177,001	0,378	0,409	0,893
Item_10	77,2054	181,246	0,203	0,314	0,897
Item_11	78,1875	178,838	0,401	0,355	0,892
Item_12	77,7054	176,786	0,403	0,432	0,892
Item_13	77,1339	171,811	0,506	0,45	0,89
Item_14	76,8482	172,887	0,541	0,57	0,889
Item_15	76,8929	173,664	0,627	0,635	0,887
Item_16	76,6607	172,551	0,693	0,615	0,886
Item_17	77,0089	168,892	0,727	0,72	0,884
Item_18	77,1875	170,154	0,57	0,486	0,888
Item_19	76,9911	169,775	0,597	0,574	0,887
Item_20	77,4911	176,108	0,404	0,463	0,892
Item_21	77,5357	171,422	0,528	0,583	0,889
Item_22	78,2589	172,284	0,458	0,516	0,891
Item_23	76,7946	174,867	0,416	0,38	0,892
Item_24	77,5536	176,718	0,448	0,424	0,891

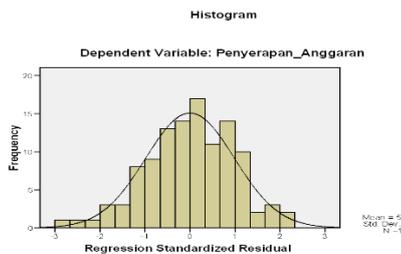
Sumber: Hasil pengolahan data

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dapat disimpulkan seluruh pertanyaan dinyatakan reliabel.

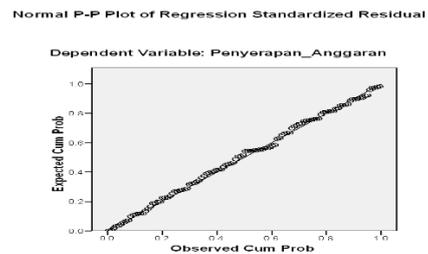
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1
Grafik Histogram



Gambar 2
grafik normal *P-Plot*



Sumber: hasil pengolahan data, 2015

Dari gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan bahwa baik grafik histogram maupun grafik normal *P-Plot* memberikan pola distribusi normal, dimana data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Pola seperti gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi dapat digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,202	1,980		2,122	,036		
Perencanaan_Anggaran	,254	,106	,269	2,391	,019	,540	1,852
Pelaksanaan_Anggaran	,072	,094	,077	,762	,448	,677	1,476
Pengawasan_Intern	,207	,103	,238	1,997	,048	,482	2,075

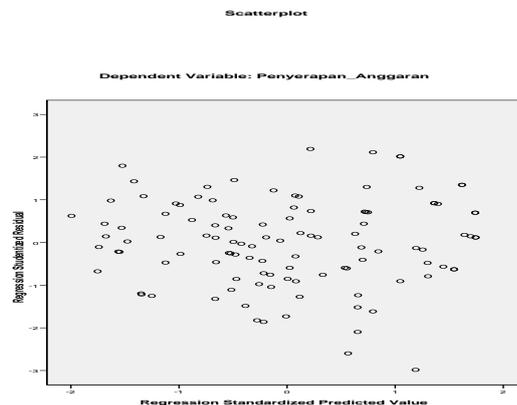
Sumber: Hasil pengolahan data

Dari tabel 6, menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan *Variance*

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedasitas

Gambar 3
Hasil uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data

Dari gambar 3, menunjukkan grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

1. Uji Hipotesis

Agar dapat mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran belanja melalui model regresi dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran. Hasil regresi menghasilkan model seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Analisa t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,202	1,980		2,122	,036
Perencanaan_ Anggaran	,254	,106	,269	2,391	,019
Pelaksanaan_ Anggaran	,072	,094	,077	,762	,448
Pengawasan_ Intern	,207	,103	,238	1,997	,048

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Nilai t_{table} dengan $n = 112$ maka $df = (n-k-1) = (112-3-1) = 108$. Dengan $df = 108$ dan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{table} sebesar 1,982

Berdasarkan hasil analisa regresi berganda pada tabel diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,202 + 0,254 X_1 + 0,072 X_2 + 0,207 X_3 + e$$

Interpretasi atas persamaan di atas adalah:

- Jika Perencanaan Anggaran (X_1), Pelaksanaan Anggaran (X_2), dan Pengawasan Intern (X_3) sama dengan nol, maka nilai Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 4,202
- Nilai koefisien regresi Perencanaan Anggaran (X_1) bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah dengan Penyerapan Anggaran (Y), artinya apabila Perencanaan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan maka penyerapan anggaran mengalami hal sama demikian pula sebaliknya. Artinya, jika Perencanaan Anggaran (X_1) mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan kenaikan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,254 persen.
- Nilai koefisien regresi Pelaksanaan Anggaran (X_2) bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah dengan Penyerapan Anggaran (Y), artinya apabila Pelaksanaan Anggaran (X_2) mengalami kenaikan maka penyerapan anggaran (Y) mengalami hal sama demikian pula sebaliknya. Artinya, jika Pelaksanaan Anggaran (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan kenaikan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,072 persen.
- Nilai koefisien regresi Pengawasan Intern (X_3) bernilai positif menunjukkan pengaruh yang searah dengan Penyerapan Anggaran (Y), artinya apabila Pengawasan Intern (X_3) mengalami kenaikan maka penyerapan anggaran (Y) mengalami hal sama demikian pula sebaliknya. Artinya, jika Pengawasan Intern (X_3) mengalami kenaikan satu satuan, maka akan menyebabkan kenaikan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,207 persen.

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	477,597	3	159,199	12,657	,000(a)
Residual	1358,368	108	12,577		
Total	1835,964	111			

Sumber: Hasil pengolahan data

Nilai t_{table} dengan $n = 112$ maka $df = (n-k-1) = (112-3-1) = 108$. Dengan $df = 108$ dan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai F_{table} sebesar 2,69

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,391 > t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Kesimpulannya H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya perencanaan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini perencanaan anggaran diukur dengan enam pertanyaan. Artinya jika 1) anggaran disusun dan telah mengacu pada arah kebijakan Kemenkes, 2) Penyusunan perencanaan dan anggaran telah berorientasi kinerja, 3) Penyusunan perencanaan dan anggaran telah mengikuti standar biaya yang telah ditetapkan, 4) Perencanaan dan anggaran telah disusun secara realistis dan dilengkapi data dukung, 5) Penyusunan perencanaan anggaran sudah dilakukan kajian mendalam dan memperhatikan hasil evaluasi tahun lalu serta (6) Penetapan target dan pengalokasian anggaran telah memperhitungkan sumber daya yang ada akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Proses perencanaan kegiatan dan penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran. Apabila variabel lainnya dianggap konstan, dan faktor perencanaan semakin baik maka mempunyai probabilitas/kecenderungan terhadap perubahan peningkatan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Sejalan dengan penelitian Priatno (2013), menyatakan bahwa faktor perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} 0,762 < t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Kesimpulannya H_0 diterima dan menolak H_2 , artinya pelaksanaan anggaran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun 1) Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan setelah DIPA turun, 2) Pejabat pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat telah tersedia di setiap satker, 3) Jumlah SDM yang memahami pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan kebutuhan, 4) Peraturan tentang mekanisme pencairan dana telah disosialisasikan secara rutin, 5) Proses

pelelangan barang dan jasa telah mengikuti Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, 6) Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran diterima tepat waktu serta 7) Penetapan pejabat pengelola keuangan satker dilaksanakan tepat waktu tidak berpengaruh dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

Hal ini disebabkan karena Satuan Kerja (Satker) belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Hal ini sejalan dengan penelitian Yustika (2012), menyatakan lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan dan tidak ada inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif lama. Demikian juga penelitian tersebut (Lusiana, 1997) menyatakan bahwa kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan.

Pengaruh pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran

Hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} 1,997 > t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Kesimpulannya H_0 ditolak dan menerima H_3 , artinya pengawasan intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Artinya jika 1) Pengawasan dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan, 2) Pimpinan melakukan supervisi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan bawahan, 3) Pimpinan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap laporan yang diterima, 4) Tersedia pedoman yang merupakan penjabaran operasional terhadap kebijakan yang lebih tinggi, 5) Standar dan rambu-rambu yang harus dipatuhi dilaksanakan oleh seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana serta (6) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya maka akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan kegiatan yang penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Pengawasan dapat dilakukan oleh pimpinan atasan langsung dan dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Penelitian Mardiasmo (2009), pengawasan tidak saja diperlukan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga pada tahap perencanaan. Sejalan dengan penelitian Alamsyah (1997), bahwa tujuan

pengawasan anggaran adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan, dan hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran

Hasil nilai uji F yang diperoleh yaitu nilai $F_{hitung} 12,657 > F_{tabel} 2,69$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern terhadap penyerapan anggaran. Artinya jika 1) Perencanaan Anggaran, 2) Pelaksanaan Anggaran dan 3) Pengawasan Intern dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang disusun dengan baik, merupakan faktor yang paling penting dalam penyerapan anggaran diikuti oleh pengawasan intern dan pelaksanaan anggaran.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran.
- b. Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran setiap Satuan Kerja (Satker) agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.
- c. Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengawasan merupakan kegiatan yang penting agar anggaran yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Apabila aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern dilaksanakan secara baik, efektif dan efisien akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini sampel penelitian hanya dari lingkungan Satker Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan. Apabila keterwakilan sampel diambil dari seluruh unit-unit Eselon 1 Kementerian Kesehatan kemungkinan akan memberikan hasil yang lebih baik. Keterbatasan lainnya adalah peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan intern.

Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

Implikasi Teoritis

Obyek penelitian terbatas pada lingkungan Satker Badan Litbangkes, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralis. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas obyek yang diteliti dan melakukan *in depth interview* atau wawancara untuk mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Implikasi Praktis

- 1) Bagi Satker Pemerintah khususnya Satker Badan Litbangkes
 - a) Satker disarankan membuat jadwal pelaksanaan anggaran dan rencana penarikan dana yang lebih realistis dan akurasi untuk dijadikan pedoman dalam pencairan dana.
 - b) Dalam pelaksanaan anggaran Satker harus mengikuti jadwal pelaksanaan dan rencana penarikan dana yang telah tertuang dalam RKA-KL untuk menghindari terjadinya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun atau triwulan ke empat.
- 2) Bagi pengelola anggaran diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Daftar Referensi

Alamsyah. 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman. *Tesis Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan)*

- Fuadi, Arif. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi* 1.1
- Ghozali, Iman. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Yogyakarta
- Instruksi Presiden No 15 Tahun 1983* tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
- Kuswoyo, Iwan, Dwi. 2011. Analisis atas Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri) *Tesis Universitas Gadjah Mada*
- Lusiana, Endang. 1997. Hubungan Antara Kemampuan Penyerapan Anggaran dengan Pengendalian Waktu Pelaksanaan Proses Pembayaran Pada Proyek Konstruksi Bank BNI. *Tesis tidak diterbitkan. Jakarta. Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Sipil Universitas Indonesia*
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugroho, Mashudi Adi, and Candra Fajri Ananda. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1.2
- Nuning Hindriani, Imam Hanafi, and Tjahjanulin Domai. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)." *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora* 15.3 (2013)
- Pahursip, Bilmar. 2008. Tinjauan Umum Realisasi APBN Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Agregat. *Jurnal Ekonomi/Tahun XXIII, No.01, Maret 2008*
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012* tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009* tentang Perencanaan Kas
- Priatno, Prasetyo Adi, and Muhammad Khusaini. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1.2
- Siswanto, Rahayu. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010 (Kajian singkat 7 Kementerian/Lembaga). *Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Stiglitz, Joseph E. 1999. *Economics of the Public Sektor. Third edition. New York. W.W. Norton & Company*

- Sukadi. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KKPN Yogyakarta). *Tesis Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan)*
- Sulaeman dkk. (2010) Penyerapan Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal BPPK, Vol. 04 Tahun 2012*
- Susanto, Heru. 2006. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam Mewujudkan Good Governace. *Jurnal Sosial & Humaniora, Vol. 02 (No. 01)*
- Syakhroza, Akhmad. 2008. Telaah Governance Sistem Keuangan Negara. *Jurnal Usahawan, No.05, TH XXXVII*
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zulkifli, Amsyah. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama